



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI, RISET DAN INOVASI, SERTA INDUSTRI)**

Tahun Sidang	: 2021- 2022
Masa Persidangan	: V
Rapat	: Ke - 33 (Tiga Puluh Tiga)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala BPH Migas
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 23 Juni 2022
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d 13.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai I, secara tatap muka dan <i>virtual</i>
Acara	: 1. Evaluasi pengawasan distribusi BBM subsidi selama bulan Ramadhan dan libur lebaran Tahun 2022 2. Strategi dalam penanganan penyimpangan BBM subsidi 3. Progres digitalisasi SPBU dalam rangka pengawasan pendistribusian BBM 4. Lain-lain
Ketua Rapat	: Bambang Haryadi, SE (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P. Gerindra)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir	: A. Pemerintah 1. Kepala BPH Migas B. 35 Orang Anggota dari 52 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI terdiri dari: 12 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik 23 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual 17 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Kamis, 23 Juni 2022 dibuka pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Bambang Haryadi, SE, selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi P. Gerindra, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Evaluasi pengawasan distribusi BBM subsidi selama bulan Ramadhan dan libur lebaran Tahun 2022
 - b. Strategi dalam penanganan penyimpangan BBM subsidi
 - c. Progres digitalisasi SPBU dalam rangka pengawasan pendistribusian BBM
 - d. Lain-lain
3. Rapat Dengar Pendapat dilanjutkan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo Fraksi Partai Demokrat, A-555

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mengapresiasi kinerja BPH Migas yang telah berkoordinasi dengan berbagai sektor dalam rangka menjamin kehandalan pendistribusian BBM selama bulan Ramadhan dan libur lebaran Tahun 2022.
2. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas untuk meningkatkan kerja sama dengan Komisi VII DPR RI, aparat penegak hukum, dan media dalam rangka mengungkap dan menindak tegas praktek-praktek ilegal seperti penimbunan dan penyelewengan BBM bersubsidi.
3. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas guna melakukan evaluasi *database* konsumen pengguna untuk mengoptimalkan pemanfaatan program digitalisasi SPBU dalam rangka meningkatkan kinerja BPH Migas terhadap pengawasan kegiatan pendistribusian BBM di SPBU.
4. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas untuk melakukan koordinasi intensif dengan institusi terkait agar kegiatan kalibrasi meteran secara berkala dilakukan sesuai aturan untuk memastikan kuota BBM tepat jumlah dan tepat sasaran.
5. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BPH Migas untuk melakukan evaluasi pengelolaan BBM Satu Harga demi mewujudkan keadilan energi bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di wilayah kepulauan dan daerah 3T.

6. Komisi VII DPR RI meminta Kepala BPH Migas untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2022.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 13.30 WIB

Jakarta, 23 Juni 2022

KETUA RAPAT,

KEPALA BPH MIGAS

ERIKA RETNOWATI, Ak.M.Si

SARTONO HUTOMO

A-555